KABUPATEN
WONOSOBO

SDGs
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

Wonosobo
The Souls of Java

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN 2027

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO





INTEGRITAS | INOVATIF | KOLABORATIF | ADAPTIF | BERKELANJUTAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 ini. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, serta memperhatikan ketentuan umum tata cara perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini merupakan hasil penyempurnaan atas rancangan awal dan rancangan Renja Perangkat Daerah setelah memperhatikan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, musrenbang RKPD, serta penyelarasan akhir terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027, sebagai dasar penetapan Renja Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2027 guna mendukung pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Wonosobo, 30 Juli 2026

Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonosobo



Drs.TONO PRIHATONO

Pembina Utama Muda

NIP. 197402111993031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa dokumen perencanaan daerah menjadi dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran daerah, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara teknis, tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selain itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi tahunan yang memiliki fungsi strategis sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi instrumen untuk menerjemahkan kebijakan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam rencana kerja yang lebih operasional, terukur, dan dapat dilaksanakan. Sebagai dokumen perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah, Renja memiliki peran yang sangat fundamental karena menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Renja juga menjadi dasar pengusulan program dan kegiatan yang didanai melalui APBD Provinsi maupun APBN. Oleh karena itu, kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat menentukan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja disusun secara terpadu, partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, kondisi eksisting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, isu-isu strategis pembangunan, serta hasil penelaahan terhadap prioritas pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan implementasi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029 dengan tema "**Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan".** Tema tersebut merupakan tahapan "**Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata**" dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Wonosobo, yaitu "**Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur".** Oleh karena itu, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penguatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Dalam proses tersebut dilakukan pengumpulan data dan informasi, analisis kondisi pelayanan Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi pencapaian Renstra, penelaahan terhadap RKPD, serta penyempurnaan program dan kegiatan berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Proses penyusunan RKPD dan Renja PD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 Proses Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah



Rancangan Akhir Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disusun pada tahapan sebelumnya. Penyusunan Rancangan Akhir ini mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 sesuai ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyempurnaan dilakukan untuk mempertajam sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, lokasi, kelompok sasaran, serta penyelarasan kebutuhan pendanaan dari pagu indikatif

menjadi pagu definitif sesuai hasil pembahasan, sinkronisasi kebijakan, dan kemampuan keuangan daerah.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 diharapkan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pencapaian target Renstra Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029.

1.2 Dasar Hukum

Landasan dalam penyusunan Rencana Awal Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 ini adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi di Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029;
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda Kabupaten Wonosobo adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kabupaten Wonosobo tahun 2027 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Wonosobo secara berkesinambungan.

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah agar selaras dengan Perkada tentang RKPD Tahun 2027. Tujuannya adalah menghasilkan dokumen rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang definitif, terukur, dan menjadi bahan penyusunan RKA-PD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan (IKU dan IKK Tahun 2025).

Memuat evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025, termasuk capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027.

Berisi rumusan permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, menjadi landasan perumusan program dan kegiatan.

2.3 Inovasi Bidang Urusan

Menguraikan inovasi daerah yang dilaksanakan dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review dan Perbandingan Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Membandingkan rumusan Rancangan Awal dengan

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah beserta penjelasan atas perbedaan yang terjadi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2 Arah Kebijakan

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah yang menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan Tahun 2027, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan uraian ringkas dan garis besar mengenai program dan kegiatan yang diusulkan, penjelasan mengenai faktor-faktor penentu atau pertimbangan yang menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Bappeda.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB VI PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan (IKU dan IKK Tahun 2025)

Menjelaskan evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 sebagai capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Substansi ini merupakan pengembangan dari sub bab Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), yang disajikan dengan format Tabel T-C.29/ Tabel 2.1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, secara umum capaian kinerja Bidang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagian besar Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah mencapai target sebesar 100 persen, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan serta mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah. Pada urusan perencanaan pembangunan daerah, seluruh indikator yang berkaitan dengan kualitas dokumen perencanaan menunjukkan capaian optimal. Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah, keselarasan Program RPJMD dengan RKPD, keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan masing-masing telah mencapai target sebesar 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan, sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah telah terlaksana secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pula pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, seluruh indikator yang mengukur keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah mencapai target 100 persen. Ketersediaan data perencanaan sesuai standar operasional prosedur pada masing-masing bidang juga telah terpenuhi secara optimal, sehingga mendukung terselenggaranya

proses perencanaan yang terintegrasi, akurat, dan berbasis data. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator yang meliputi persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik, cakupan pelayanan administrasi perkantoran, persentase keterisian data statistik sektoral, serta keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD juga telah mencapai target sebesar 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi penunjang administrasi, pengelolaan aset, penyediaan data, serta tata kelola internal telah berjalan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Pada urusan penelitian dan pengembangan, indikator Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan menunjukkan kinerja yang sangat baik, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Target tahun 2025 sebesar 20 persen berhasil direalisasikan sebesar 25 persen atau mencapai 125 persen dari target. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya pemanfaatan hasil inovasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sementara itu, indikator Persentase Kajian/Riset Berbasis Bukti belum dapat dievaluasi secara penuh pada periode Triwulan II karena pelaksanaan kajian masih berlangsung dan hasil akhirnya baru akan tersedia pada akhir tahun anggaran. Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang realisasinya belum dapat disajikan pada Triwulan II, antara lain Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan, serta beberapa indikator penelitian dan pengembangan yang pengukurannya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi instansi pembina atau penyelesaian dokumen pada akhir tahun. Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut akan menjadi fokus pemantauan pada semester berikutnya hingga diperoleh capaian akhir Tahun 2025.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 berada pada kategori sangat baik. Mayoritas indikator kinerja telah memenuhi target, sedangkan indikator yang belum memiliki realisasi pada Triwulan II disebabkan oleh karakteristik pengukuran yang bersifat tahunan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), yang disajikan dengan format Tabel T-C.29. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Wonosobo

Nama Perangkat Daerah : BAPPEDA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	1				PERENCANAAN									
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	N/A	N/A	90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Persentase keterisian data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Nilai hasil pengawasan kearsipan	N/A	N/A	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	*1*	*1*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5	*1*	*1*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu*	*15 dokumen*	*15 dokumen*	*2 dokumen/ bulan*	*2 dokumen/ bulan*	*100%*	*15 dokumen*	*100%*	*100%*
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 ASN/bulan	37 ASN/bulan	41 ASN/bulan	41 ASN/bulan	100%	41 ASN/bulan	100%	100%
5	*1*	*1*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase realisasi belanja administrasi umum*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	100%
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	100%
5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	100%
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	100%	100%
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%	100%
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi RKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%	100%
5	*1*	*1*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan derah*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	10 unit	0 unit	0 unit	100%	1 laporan	*100%*	*100%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%	100%
5	*1*	*1*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	*Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 unit	19 unit	19 unit	19 unit	100%	19 unit	100%	100%
5	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	4 unit	4 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	100%	100%
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	50 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	100%	100%
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%	100%
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5	1	2	2.01		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	100%	100%
5	*1*	*2*	*2.02*		*Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Persentase ketersian data capaian indikator RPJMD*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan	39 orang	39 orang	39 orang	39 orang	100%	39 orang	*100%*	*100%*
5	*1*	*2*	*2.03*		*Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi RKPD yang tersusun tepat waktu*	*4 dokumen*	*4 dokumen*	*4 dokumen*	*4 dokumen*	100%	*4 dokumen*	*100%*	*100%*
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	100%	100%
5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
						Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Perekonomian dan SDA	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	*1*	*3*	*2.01*		*Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	*Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tepat waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan	100%	100%
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	100%	100%
5	*1*	*3*	*2.02*		*Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	*Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen renja bidang perekonomian dan SDA tepat waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	100%	100%
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	100%	100%
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
5	**5**	**2**			**PROGRAM RISET DAN INOVASI**	**Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan**	**20%**	**N/A**	**20%**	**25%**	**125%**			
						Persentase Kajian/Riset Berbasis Bukti	**N/A**	**N/A**	**5%**	**N/A**	**N/A**			
5	*5*	*2*	*2.01*		*Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan*	*Jumlah dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan*	*N/A*	*N/A*	*2 dokumen*	*N/A*	*N/A*			
5	5	2	2.01	3	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah dokumen fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%	100%
5	5	3	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%	100%
5	5	3	2.01	6	Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5	5	3	2.02	1	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%	100%
5	5	3	2.02	2	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset	Jumlah mitra perusahaan pemula berbasis riset yang difasilitasi pembinaan dan pengembangannya	1 mitra	N/A	1 mitra	N/A	N/A	1 mitra	N/A	N/A

CAPAIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN WONOSOBO

Realisasi 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022–2025 terhadap Target Renstra 2026

Rata-Rata Capaian Kinerja 2024

103,50% Predikat BAIK

(96,08% pasca normalisasi AKIP)

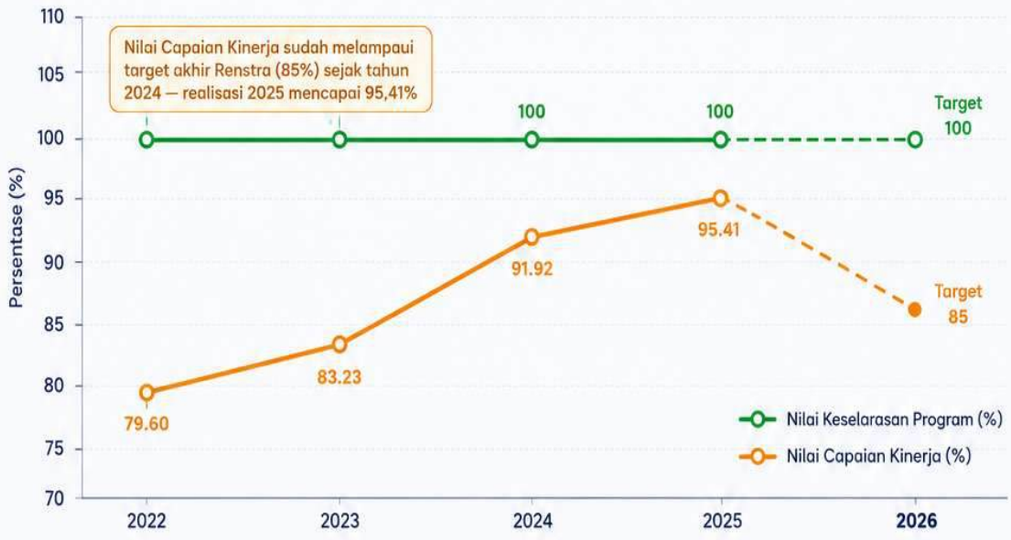
Rata-Rata Capaian Kinerja 2025

100,05% Predikat BAIK

Rata-rata capaian 4 indikator sasaran

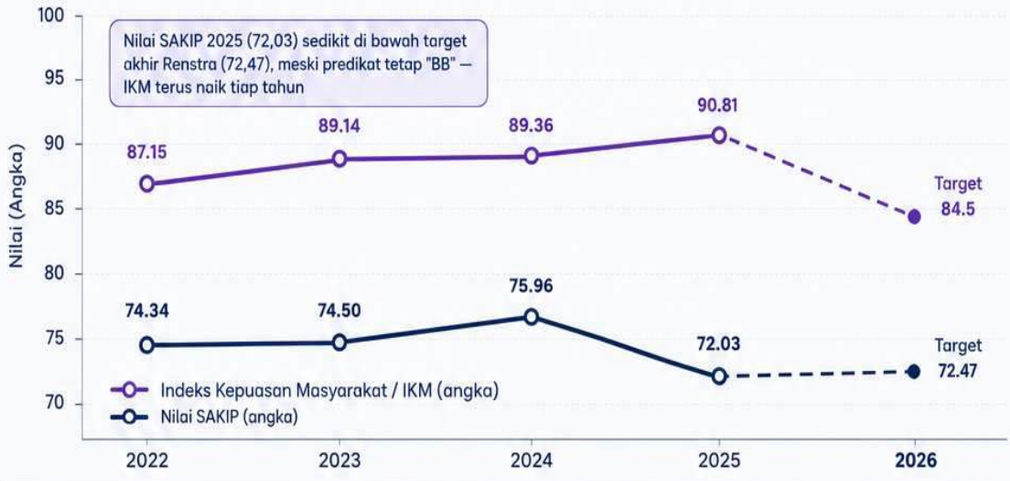
1 SASARAN 1 – MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA PERENCANAAN

Realisasi 2022–2025 vs Target Akhir Renstra 2026 · Sumber: LKjIP Bappeda 2024 & 2025 (Tabel 3.4)



2 SASARAN 2 – MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK OPTIMAL & PEMERINTAHAN AKUNTABEL

Realisasi 2022–2025 vs Target Akhir Renstra 2026 · Sumber: LKjIP Bappeda 2024 & 2025 (Tabel 3.5)



Catatan: Grafik menampilkan realisasi aktual 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis Bappeda dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2024 (hasil reviu Inspektorat) dan Tahun 2025. Data realisasi tahun 2021 tidak tersedia pada dokumen sumber (indikator baru mulai diukur dan dilaporkan secara konsisten sejak tahun 2022).
Titik "Target 2026" merupakan target akhir Renstra 2021–2026, bukan realisasi.

Sumber data: LKjIP Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 (Hasil Reviu Inspektorat) & Tahun 2025

Penjelasan dari grafik/diagram 2.1

Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2022–2025

Grafik di atas menggambarkan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Wonosobo dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel selama periode 2022–2025, dengan membandingkan realisasi indikator kinerja utama terhadap target akhir Renstra Tahun 2026. Data tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja sekaligus posisi capaian Bappeda dalam memenuhi sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2024, rata-rata capaian kinerja tercatat sebesar 103,50%, sedangkan pada tahun 2025 mencapai 100,05%. Kedua capaian tersebut memperoleh predikat “Baik”, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda secara keseluruhan telah berjalan efektif dan mampu memenuhi, bahkan pada beberapa aspek melampaui, target kinerja yang ditetapkan.

Pada Sasaran 1, yaitu meningkatnya kualitas kinerja perencanaan, terlihat adanya tren peningkatan nilai capaian kinerja dari tahun ke tahun. Nilai capaian meningkat dari 79,60% pada 2022, menjadi 83,23% pada 2023, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 91,92% pada 2024, dan mencapai 95,41% pada 2025. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 15,81 poin persentase antara tahun 2022 dan 2025. Capaian tahun 2025 tersebut telah melampaui target akhir Renstra 2026 sebesar 85%.

Sementara itu, Nilai Keselarasan Program menunjukkan kondisi yang sangat baik. Indikator tersebut konsisten berada pada angka 100% selama periode 2022–2025 dan memiliki target akhir Renstra 2026 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan keselarasan antara perencanaan program dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah yang semakin terintegrasi.

Pada Sasaran 2, yaitu mewujudkan pelayanan publik optimal dan pemerintahan yang akuntabel, terdapat dua indikator utama yang menunjukkan dinamika berbeda. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami tren peningkatan dari 87,15 pada 2022, menjadi 89,14 pada

2023, 89,36 pada 2024, dan mencapai 90,81 pada 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Target akhir Renstra 2026 untuk indikator ini adalah 84,50, sehingga capaian tahun 2025 telah berada di atas target tersebut.

Di sisi lain, Nilai SAKIP mengalami peningkatan dari 74,34 pada 2022 menjadi 74,50 pada 2023, kemudian 75,96 pada 2024, sebelum turun menjadi 72,03 pada 2025. Capaian tahun 2025 masih berada di bawah target akhir Renstra 2026 sebesar 72,47, sehingga aspek akuntabilitas kinerja masih memerlukan perhatian dan penguatan.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa kinerja Bappeda Kabupaten Wonosobo berada pada arah yang positif, khususnya dalam kualitas perencanaan, keselarasan program, dan kepuasan masyarakat. Namun demikian, peningkatan kualitas SAKIP perlu menjadi perhatian strategis agar pencapaian indikator kinerja berlangsung lebih konsisten. Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, kualitas perencanaan berbasis data, serta tindak lanjut hasil evaluasi secara berkelanjutan agar seluruh indikator dapat mencapai atau melampaui target akhir Renstra 2026. Dengan demikian, Bappeda diharapkan semakin mampu menjadi penggerak perencanaan pembangunan daerah yang efektif, terukur, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta manfaat bagi masyarakat.

Sebagai kelanjutan evaluasi capaian kinerja bidang urusan, disajikan pula indikator pelayanan Perangkat Daerah lainnya. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo bukan merupakan perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pelayanan Bappeda dilakukan melalui indikator pelayanan perangkat daerah yang menggambarkan kualitas tata kelola perencanaan, akuntabilitas kinerja, inovasi daerah, serta kepuasan pemangku kepentingan.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAPPEDA KABUPATEN WONOSOBO

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD Tahun n-2 (2025)	Target Renstra PD Tahun n-1 (2026)	Target Renstra PD Tahun n (2027)	Target Renstra PD Tahun n+1 (2028)	Realisasi Capaian Tahun n-2 (2025)	Realisasi Capaian Tahun n-1 (2026)	Proyeksi Capaian Tahun n (2027)	Proyeksi Capaian Tahun n+1 (2028)	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja		☑	21.95	22.15	22.31	22.47	22.03	N/A	22.31	22.47	
2	Nilai Keselarasan Program Prioritas		☑	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	
3	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran		☑	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
4	Nilai kapabilitas Inovasi		☑	2.92	2.94	2.96	2.98	3.02	N/A	N/A	N/A	
5	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah		☑	47	48	48	49	44	N/A	48	49	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		☑	73,00	74,00	75,00	77,00	72.03	N/A	75,00	77,00	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		☑	89.61	89.68	90.21	90.61	89.36	N/A	90.21	90.61	

Grafik/Diagram 2.2



PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAPPEDA KABUPATEN WONOSOBO • TABEL 2.2

INDIKATOR KINERJA	2025 Target | Realisasi		2027 Target | Proyeksi		Status
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	PROYEKSI	
1. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21.95	22.03	22.31	22.31	≥ Target
2. Nilai Keselarasan Program Prioritas	100%	100%	100%	100%	≥ Target
3. Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang terakomodir	100%	N/A	100%	100%	Data N/A
4. Nilai Kapabilitas Inovasi	2.92	3.02	2.96	N/A	≥ Target
5. Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	47.00	44.00	48.00	48.00	< Target
6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73.00	72.03	75.00	75.00	< Target
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.61	89.36	90.21	90.21	< Target

RINGKASAN: Capaian 2025 umumnya mendekati atau mencapai target. Beberapa indikator menunjukkan kebutuhan penguatan, terutama SAKIP Perangkat Daerah.

Catatan: N/A mengikuti data pada Tabel 2.2. Proyeksi 2027 hanya ditampilkan jika tersedia pada tabel.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terhadap realisasi Tahun 2025, secara umum capaian kinerja pelayanan Bappeda menunjukkan hasil yang baik. Dari tujuh indikator pelayanan yang dievaluasi, sebagian besar telah mencapai target atau menunjukkan tren peningkatan pada periode perencanaan berikutnya. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, penelitian, dan pengembangan telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Penjelasan atas indikator pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

- Indikator **Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja** menunjukkan realisasi Tahun 2025 sebesar **22,03**, melampaui target Renstra sebesar **21,95**. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kualitas perencanaan kinerja semakin baik dan telah memenuhi aspek keselarasan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta dokumen perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2027 dan 2028 nilai tersebut diproyeksikan terus meningkat menjadi **22,31** dan **22,47**;
- Indikator **Nilai Keselarasan Program Prioritas** telah mencapai target **100 persen**, menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah telah selaras dengan prioritas

pembangunan daerah maupun prioritas nasional. Demikian pula indikator **Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam Perencanaan dan Penganggaran** ditargetkan mencapai **100 persen**, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan secara partisipatif;

- Pada aspek inovasi daerah, **Nilai Kapabilitas Inovasi** telah melampaui target yang ditetapkan. Target Renstra Tahun 2025 sebesar **2,92** berhasil direalisasikan sebesar **3,02**, yang menunjukkan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan inovasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Capaian tersebut menjadi modal penting dalam mendorong budaya inovasi yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

- Sementara itu, **Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah** dan **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi Nilai Kematangan Organisasi Tahun 2025 sebesar **44** masih berada di bawah target **47**, sedangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar **72,03** dari target **73,00**. Meskipun demikian, kedua indikator tersebut masih menunjukkan kondisi yang baik dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas manajemen kinerja, serta penyempurnaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- Pada indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, realisasi Tahun 2025 sebesar **89,36** sedikit di bawah target **89,61**, namun masih berada dalam kategori pelayanan yang sangat baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Bappeda telah mampu memenuhi harapan sebagian besar pengguna layanan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam aspek kecepatan layanan, kemudahan akses informasi, dan peningkatan kualitas komunikasi kepada pemangku kepentingan. Target IKM diproyeksikan meningkat menjadi **90,21** pada Tahun 2027 dan **90,61** pada Tahun 2028 sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, evaluasi capaian kinerja pelayanan perangkat daerah menunjukkan bahwa kinerja Bappeda Kabupaten Wonosobo berada pada kondisi yang baik dengan sebagian besar indikator telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Adapun indikator yang belum mencapai target menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun berikutnya melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja, pengembangan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan penyusunan Rancangan Akhir Renja Bappeda Tahun 2027 agar semakin efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Wonosobo.

2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, serta perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional maupun daerah, dirumuskan berbagai permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda pada Tahun 2027. Rumusan ini menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan agar lebih responsif terhadap tantangan pembangunan serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Secara umum, hasil evaluasi Renja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kematangan organisasi, optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, dinamika kebijakan pemerintah pusat yang semakin menekankan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan menuntut Bappeda untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola

perencanaan. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Bappeda Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, penganggaran, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
2. Belum optimalnya kualitas data perencanaan pembangunan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy);
3. Belum optimalnya kualitas pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akuntabel;
4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, dan inovasi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah;
6. Masih perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, transformasi digital, serta kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

Berdasarkan permasalahan tersebut, isu strategis yang akan menjadi fokus penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 meliputi:

1. Penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, adaptif, partisipatif, dan berbasis kinerja;
2. Pengembangan sistem data perencanaan dan statistik sektoral yang terpadu sebagai fondasi perencanaan berbasis data dan pengambilan keputusan yang berkualitas;

3. Peningkatan efektivitas pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian target RPJMD dan prioritas pembangunan nasional.;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, SAKIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan manajemen Risiko;
5. Optimalisasi penelitian, pengembangan, serta inovasi daerah guna menghasilkan kebijakan yang inovatif, berbasis bukti, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah;
6. Percepatan transformasi digital dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, pengelolaan data, dan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Rumusan permasalahan dan isu strategis tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027. Melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat sasaran, diharapkan Bappeda mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.3 Inovasi Bidang Urusan

Program Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, dan kegiatan Invensi dan Inovasi.

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah, melalui Koordinasi-koordinasi kegiatan KKN, koordinasi Indeks Inovasi Daerah (IID), sosialisasi pengukuran IID,

entry data dukung untuk pengukuran IID, dan koordinasi dengan BRIN;

b. Kegiatan Invensi dan Inovasi dilaksanakan melalui Sosialisasi dan pendaftaran Lomba krenova provinsi, entry proposal Lomba Krenova Provinsi Jawa Tengah, Penilaian Final Lomba Krenova Provinsi Jawa Tengah, Sosialisasi Lomba Krenova Kabupaten Wonosobo

c. Selain itu, inovasi bidang urusan lainnya yang dikembangkan Bappeda Kabupaten Wonosobo antara lain :

- Sekolah Perencana Gotong Royong yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi perencana Perangkat Daerah di lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Sistem Informasi Manajemen Kesejahteraan (SiMaKe) aplikasi berbasis web yang dirancang untuk pengelolaan data kemiskinan di tingkat daerah. Tujuan utama aplikasi ini adalah agar data kemiskinan menjadi akurat dan terkini, serta untuk memastikan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh berbagai Perangkat Daerah (OPD) dapat terpadu dan saling bersinergi. Sistem ini menciptakan keselarasan antara data kemiskinan daerah dengan data kemiskinan dari Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.
- Aplikasi Garasi Data Utama Perencanaan (Gardu Perencanaan) adalah aplikasi sistem informasi evaluasi daerah terpadu dan terintegrasi, yang dikembangkan dengan teknologi berbasis web (client server) untuk mendukung program monev kerja di Pemerintah Kabupaten Wonosobo, sehingga menjadi lebih mudah dan efisien.

2.4 (Khusus Rancangan Akhir) Review dan Perbandingan Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Review dan perbandingan antara Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen perencanaan sesuai hasil analisis kebutuhan, hasil pembahasan dengan pemangku kepentingan, serta penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, dan pagu

anggaran telah selaras dengan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, arah kebijakan nasional, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbandingan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3 (T-C.31) menunjukkan bahwa secara umum struktur program, sasaran, indikator kinerja, dan target capaian pada Rancangan Akhir Renja tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Rancangan Awal. Perubahan yang terjadi lebih banyak berupa penyesuaian pagu anggaran, penyempurnaan alokasi belanja pada kegiatan dan subkegiatan, serta penyesuaian kebutuhan riil berdasarkan hasil pembahasan dan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, substansi perencanaan tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD / RENJA PERANGKAT DAERAH
(TABEL KHUSUS PERBANDINGAN RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH)
Kabupaten Wonosobo Bappeda Tahun 2027

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan / Perkada RKPD - Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp.000)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**						
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
	PERENCANAAN					**PERENCANAAN**						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**Rp10.911.962.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**Rp7.636.020.729**	-Rp3.275.941.271	Berkurang
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**100%**	Rp10.217.783.299			**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	Rp7.636.020.729	-Rp2.581.762.570	Berkurang
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	**91,00**				**Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**	**91,00**			
			Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral	**100%**				**Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral**	**100%**			
			Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	**65,00**				**Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan**	**65,00**			
			Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	**100%**				**Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**	**100%**			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu*	*100%*	*Rp25.900.284*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu*	*100%*	*Rp8.823.280*	-Rp17.077.004	Berkurang
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Rp10.270.666	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Rp3.785.000	-Rp6.485.666	Berkurang

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan / Perkada RKPD - Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp.000)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp.000)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	Rp15.629.618	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	Rp5.038.280	-Rp10.591.338	Berkurang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu*	*2 dokumen/bulan*	*Rp9.032.162.300*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu*	*2 dokumen /bulan*	*Rp6.485.718.884*	-Rp2.546.443.416	Berkurang
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang	*Rp9.032.162.300*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang	Rp6.485.718.884	-Rp2.546.443.416	Berkurang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum*	*100%*	Rp424.292.165	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum*	*100%*	Rp267.443.313	-Rp156.848.852	Berkurang
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp6.258.370	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp4.500.000	-Rp1.758.370	Berkurang
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp69.537.394	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp50.000.000	-Rp19.537.394	Berkurang
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Rp50.066.930	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Rp36.000.000	-Rp14.066.930	Berkurang
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 ppaket	Rp25.033.459	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 ppaket	Rp23.000.000	-Rp2.033.459	Berkurang
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Rp1.112.595	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Rp3.800.000	Rp2.687.405	Bertambah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp272.283.416	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp150.143.313	-Rp122.140.103	Berkurang
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100%*	Rp247.553.135	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100%*	Rp0	-Rp247.553.135	Berkurang
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	Rp20.861.216	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	Rp0	-Rp20.861.216	Berkurang
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	Rp226.691.919	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	Rp0	-Rp226.691.919	Berkurang

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan / Perkada RKPD - Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp.000)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp.000)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100%*	*Rp204.718.097*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100%*	*Rp672.210.240*	Rp467.492.143	Berkurang
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Rp1.668.897	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Rp1.200.000	-Rp468.897	Berkurang
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp203.049.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp146.000.000	-Rp57.049.200	Berkurang
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan		Rp0	Tetap
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp681.480.736	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp525.010.240	-Rp156.470.496	Berkurang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100%*	*Rp283.157.318*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100%*	Rp201.825.012	-Rp81.332.306	Berkurang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	Rp148.230.165	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	Rp106.583.052	-Rp41.647.113	Berkurang
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	Rp6.258.370	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	Rp4.500.000	-Rp1.758.370	Berkurang
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Rp67.657.078	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Rp37.741.960	-Rp29.915.118	Berkurang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	Rp61.011.705	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	Rp53.000.000	-Rp8.011.705	Berkurang
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Bappeda Kab. Wonosobo	**Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah**	**100%**	Rp633.464.000	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Bappeda Kab. Wonosobo	**Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah**	**100%**	**Rp330.522.628**	-Rp302.941.372	Berkurang

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan / Perkada RKPD - Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp.000)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp.000)		
			Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD	**100%**				**Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD**	**100%**			
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	**100%**				**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**			
			Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perencanaan	**100%**				**Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perencanaan**	**100%**			
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase dokumen perencanaan yang disusun*	*100%*	*Rp364.721.328*	*Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase dokumen perencanaan yang disusun*	*100%*	Rp275.522.628	-Rp89.198.700	Berkurang
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	*2 berita acara*	Rp109.416.399	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	*2 berita acara*	Rp100.522.628	-Rp8.893.771	Berkurang
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	Rp255.304.929	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	Rp175.000.000	-Rp80.304.929	Berkurang
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD*	*100%*	*Rp328.249.196*	*Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD*	*100%*	*Rp50.000.000*	-Rp278.249.196	Berkurang
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	Rp164.124.598	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	Rp25.000.000	-Rp139.124.598	Berkurang
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 orang	Rp164.124.598	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 orang	Rp25.000.000	-Rp139.124.598	Berkurang
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD yang Tersusun Tepat Waktu*	*4 dokumen*	*Rp104.618.075*	*Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD yang Tersusun Tepat Waktu*	*4 dokumen*	*Rp30.000.000*	-Rp74.618.075	Berkurang
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 laporan	Rp104.618.075	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 laporan	Rp30.000.000	-Rp74.618.075	Berkurang

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan / Perkada RKPD - Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp.000)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp.000)		
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappeda Kab. Wonosobo**	**Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**Rp1.072.037.000**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappeda Kab. Wonosobo**	**Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**Rp1.102.157.428**	Rp30.120.428	Bertambah
			Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**100%**				**Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**			
			Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**100%**				**Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100%**			
			Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**100%**				**Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100%**			
			Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	**100%**				**Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**	**100%**			
			Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Perekonomian dan SDA	**100%**				**Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Perekonomian dan SDA**	**100%**			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu*	*100%*	*Rp350.959.061*	*Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu*	*100%*	Rp507.496.114	Rp156.537.053	Bertambah
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	18 laporan	Rp132.230.442	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	18 laporan	Rp75.081.479	-Rp57.148.963	Berkurang

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan / Perkada RKPD - Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp.000)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp.000)		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 laporan	Rp218.728.619	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 laporan	Rp432.414.635	Rp213.686.016	Bertambah
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu*	*100%*	*Rp370.999.859*	*Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu*	*100%*	Rp327.761.314	-Rp43.238.545	Berkurang
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	100%	Rp230.968.627	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	100%	Rp213.968.627	-Rp17.000.000	Berkurang
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 laporan	Rp140.031.232	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 laporan	Rp113.792.687	-Rp26.238.545	Berkurang
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu*	*100%*	*Rp350.078.080*	*Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu*	*100%*	Rp266.900.000	-Rp83.178.080	Berkurang
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 laporan	Rp200.044.617	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 laporan	Rp136.900.000	-Rp63.144.617	Berkurang
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 laporan	Rp150.033.463	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 laporan	Rp130.000.000	-Rp20.033.463	Berkurang
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
4	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**		**Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan**	**22,50%**	Rp500.000.000	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**		**Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan**	**22,50%**	**Rp185.000.000**	-Rp315.000.000	Berkurang
			Persentase Kajian/ Riset Berbasis Bukti	**7.5%**				**Persentase Kajian/ Riset Berbasis Bukti**	**7.5%**			

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan / Perkada RKPD - Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp.000)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp.000)		
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		*Jumlah dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan*	*2 dokumen*	*Rp277.777.779*	*Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan*		*Jumlah dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan*	*2 dokumen*	*Rp53.000.000*	-Rp224.777.779	Berkurang
	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 laporan	Rp138.888.890	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 laporan	Rp50.000.000	-Rp88.888.890	Berkurang
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 laporan	Rp55.555.555	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 laporan	Rp3.000.000	-Rp52.555.555	Berkurang
	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah		Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan	1 dokumen	Rp83.333.334	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah		Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan	1 dokumen	Rp0	-Rp83.333.334	Berkurang
	Invensi dan Inovasi	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan inovasi*	*2 laporan*	*Rp222.222.224*	*Invensi dan Inovasi*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan inovasi*	*2 laporan*	*Rp105.000.000*	-Rp117.222.224	Berkurang
	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 laporan	Rp55.555.555	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 laporan	Rp0	-Rp55.555.555	Berkurang
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	3 laporan	Rp27.777.780	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	3 laporan	Rp25.000.000	-Rp2.777.780	Berkurang
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 laporan	Rp83.333.334	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 laporan	Rp80.000.000	-Rp3.333.334	Berkurang
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	3 laporan	Rp55.555.555	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	3 laporan	Rp0	-Rp55.555.555	Berkurang

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027.

Tabel 2.3 menyajikan hasil review (kajian ulang) terhadap dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, yang membandingkan secara sistematis antara Rancangan Awal Renja (berbasis Pagu Indikatif) dengan Rancangan Akhir Renja (hasil analisis kebutuhan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD/Pagu Definitif). Tabel ini disusun untuk memenuhi ketentuan dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, di mana setiap perangkat daerah wajib melakukan telaah atas perubahan yang terjadi antara tahap penyusunan rancangan awal dan tahap penetapan rancangan akhir dokumen perencanaan.

Secara struktur, tabel ini memuat perbandingan pada lima aspek utama untuk setiap program dan kegiatan, yaitu:

(1) nomenklatur program/kegiatan,

(2) lokasi pelaksanaan;

(3) indikator kinerja;

(4) target capaian;

(5) besaran pagu anggaran baik pada tahap indikatif maupun definitive yang kemudian diselisihkan untuk mengetahui arah perubahan anggaran (bertambah, berkurang, atau tetap).

Gambaran Umum Perubahan pada Level Program

Terdapat empat program yang menjadi objek review, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program ini mengalami penurunan pagu anggaran yang cukup signifikan, dari pagu indikatif sebesar Rp10.911.962.000 (dalam ribuan) menjadi pagu definitif sebesar Rp7.636.020.729, atau berkurang sekitar Rp3.275.941.271. Penurunan ini terutama bersumber dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (khususnya Penyediaan Gaji

dan Tunjangan ASN) serta beberapa kegiatan pengadaan barang milik daerah—seperti Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya—yang pagunya berkurang hingga menjadi nihil (Rp0) pada rancangan akhir. Sementara itu, keenam indikator kinerja program (persentase aset kondisi baik, cakupan pelayanan administrasi, nilai KIP, keterisian data statistik sektoral, nilai pengawasan kearsipan, dan keselarasan program) tetap dipertahankan targetnya sebesar 100% tanpa perubahan.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

   Program ini juga mengalami pengurangan pagu, dari Rp633.464.000 menjadi Rp330.522.628, atau berkurang sekitar Rp302.941.372 (hampir separuh dari pagu awal). Efisiensi anggaran paling menonjol terjadi pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pagunya turun drastis dari Rp328.249.196 menjadi hanya Rp50.000.000. Meskipun demikian, keempat indikator kinerja program tetap dipertahankan.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

   Berbeda dengan dua program sebelumnya, program ini justru mengalami penambahan pagu, dari Rp1.072.037.000 menjadi Rp1.102.157.428, atau bertambah sekitar Rp30.120.428. Penambahan ini terutama didorong oleh kenaikan signifikan pada kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, yang pagunya naik dari Rp218.728.619 menjadi Rp432.414.635 (hampir dua kali lipat). Hal ini mengindikasikan adanya prioritas ulang (reprioritization) kebutuhan anggaran pada bidang pembangunan manusia dalam proses penyusunan rancangan akhir.

4. Program Riset dan Inovasi Daerah

   Program ini mengalami penurunan pagu yang paling tajam secara proporsional, yaitu dari Rp500.000.000 menjadi Rp185.000.000, atau berkurang Rp315.000.000 (setara 63% dari pagu awal). Beberapa kegiatan bahkan pagunya menjadi nihil pada rancangan akhir, di antaranya Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah, Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi, serta Fasilitasi dan Pembinaan untuk Pengembangan

Perusahaan Pemula Berbasis Riset. Meskipun terjadi pemangkasan anggaran yang cukup besar, kedua indikator program (persentase produk inovasi yang dimanfaatkan sebesar 22,50% dan persentase kajian/riset berbasis bukti sebesar 7,5%) tetap dipertahankan tanpa perubahan target.

Pola Perubahan pada Level Kegiatan

Berdasarkan telaah rinci terhadap kolom "Keterangan", dapat diidentifikasi pola sebagai berikut:

- Mayoritas kegiatan mengalami penurunan pagu ("Berkurang"), yang mengindikasikan bahwa proses penyusunan rancangan akhir Renja dilakukan dalam koridor efisiensi dan rasionalisasi anggaran, sejalan dengan kapasitas fiskal daerah yang tersedia pada saat penetapan pagu definitif.
- Sebagian kecil kegiatan mengalami penambahan pagu ("Bertambah"), khususnya pada kegiatan-kegiatan strategis di bidang koordinasi perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta pada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Terdapat satu kegiatan dengan pagu tetap ("Tetap"), yaitu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, yang tidak mengalami perubahan alokasi anggaran maupun realisasi.
- Target capaian indikator kinerja secara umum tidak berubah antara rancangan awal dan rancangan akhir, baik pada level program maupun kegiatan. Hal ini penting untuk digarisbawahi karena menunjukkan komitmen konsistensi kinerja meskipun terjadi penyesuaian besaran anggaran—suatu praktik yang selaras dengan prinsip efisiensi belanja tanpa mengorbankan sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan telaahan terhadap kebijakan pembangunan nasional, arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah, prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Renstra Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029. Penyusunan tujuan dan sasaran tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan.

Sesuai ketentuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran Tahun 2027 wajib sama dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, pada penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2027 tidak dilakukan perubahan terhadap rumusan tujuan maupun sasaran perangkat daerah. Penyesuaian hanya dilakukan pada target indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 diperlukan penyempurnaan agar lebih realistis, terukur, dan mampu mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, target Tahun 2027 dapat sama, lebih tinggi, maupun lebih rendah dibandingkan target yang tercantum dalam Renstra, sepanjang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja, perkembangan regulasi, dinamika pembangunan, dan hasil pembahasan pada tahap penyusunan Rancangan Akhir Renja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun (RPJMN) 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Dalam RPJMN juga dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2025”

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah;
7. Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan"** yang akan dicapai dengan tiga sasaran pembangunan daerah meliputi:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Tahun 2027 merupakan tahap **"Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah"** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan. Tahun kedua difokuskan pada tema pembangunan yaitu **"Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi"**. Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap kedua diarahkan pada prioritas daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. Peningkatan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Memperhatikan prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka tema pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 adalah "Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan", sebagai tahapan "Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata" dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Wonosobo.

Arah prioritas untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif;
2. Penurunan ketimpangan pendapatan;
3. Penguatan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas;
4. Peningkatan kesejahteraan sosial dan kemandirian sosial ekonomi;

5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif;
6. Penguatan harmonisasi keberagaman;
7. Penguatan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan;
8. Penguatan upaya kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
9. Penguatan ketahanan iklim dan bencana;
10. Pelestarian warisan budaya daerah dan cagar budaya

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisis berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan catatan target IKU/IKK dapat melebihi atau berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai hasil evaluasi dan penajaman pada Rancangan Akhir. Analisa di atas merupakan penjelasan table T-C-25 berikut ini :

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Kondisi Akhir 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	22.03	22.15	22.31	22.47	22.63
		Meningkatnya Kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah	Nilai Keselarasan Program Prioritas	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase hasil musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Kapabilitas Inovasi	3.02	2.94	2.96	2.98	3.02
		Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal dan Pemerintahan yang akuntabel	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	44	48	48	49	49
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72.03	74,00	75,00	77,00	72.03
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89.36	89.86	90.21	90.61	91.01

3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan penjabaran operasional dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, serta berbagai kebijakan pembangunan nasional dan daerah lainnya. Dengan demikian, arah kebijakan yang ditetapkan tidak hanya menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, tetapi juga memperkuat sinergi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi utama dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, penelitian, dan pengembangan daerah, Bappeda berperan sebagai koordinator dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang terintegrasi, akuntabel, adaptif, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Oleh karena itu, arah kebijakan Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan data dan informasi yang berkualitas, pengembangan inovasi daerah, serta peningkatan efektivitas koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Arah kebijakan tersebut mendukung pencapaian visi Kabupaten Wonosobo, yaitu "**Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur**", khususnya melalui misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat). Dalam mendukung pencapaian misi tersebut, Bappeda menetapkan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah melalui strategi yang berorientasi pada perencanaan berbasis data, riset, risiko, dan kinerja. Arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027 diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, RKPD Tahun 2027 (Perkada), serta kebijakan nasional/daerah lainnya pada Rancangan Akhir, arah kebijakan dipastikan telah konsisten dengan arah

kebijakan dalam Perkada tentang RKPD Tahun 2027 yang telah ditetapkan, diringkas dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur

MISI : Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya sebagai pengemban AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat)

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pembangunan	1	Penguatan kompetensi sumber daya manusia Perencana	Mewujudkan perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja
	2	Meningkatnya kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah	2	Pelaksanaan Musrenbang tematik	
			3	Peningkatan kualitas data dan informasi	
			4	Penguatan pengukuran kinerja	
			5	Pengatan sinergitas dengan stakeholder terkait	
			6	Penguatan perencanaan Perangkat Daerah berbasis data dan prioritas daerah	
			7	Penyelenggaraan forum diskusi komunitas	
			8	Sinkronisasi perencanaan tahunan daerah dengan RPJMD	
			9	Monitoring evaluasi penerapan standar pengisian data dan informasi untuk perencanaan sesuai prinsip Satu Data	
			10	Sinkronisasi perencanaan , penganggaran dan penatausahaan	
			11	Internalisasi hasil riset dan inovasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan	

3.3 Matriks Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan/Sasaran, dan Program/Kegiatan Tahun 2027

Untuk memverifikasi secara eksplisit keterpaduan antara isu-isu strategis sebagaimana dirumuskan pada Sub Bab 2.3 dengan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah (Sub Bab 3.1) serta program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2027 (Bab IV), berikut disajikan matriks keterkaitan Isu Strategis – Tujuan/Sasaran – Program/Kegiatan. Matriks ini menunjukkan bahwa setiap isu strategis telah diintervensi melalui program dan kegiatan tertentu, sehingga integrasi antar tahapan perencanaan dapat ditelusuri secara langsung.

Tabel 3.3

MATRIKS KETERKAITAN ISU STRATEGIS – TUJUAN/SASARAN – PROGRAM/KEGIATAN

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM TERKAIT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG RELEVAN	KETERANGAN KETERKAITAN
1	Penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, adaptif, partisipatif, dan berbasis kinerja	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	• Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah • Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD • Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Program ini secara langsung menjadi instrumen penguatan kualitas perencanaan yang terintegrasi dan berbasis kinerja melalui penjaminan keselarasan dokumen perencanaan berjenjang
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	• Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) • Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD (Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) • Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD (Bidang Perekonomian dan SDA)	Mendukung aspek partisipatif dan adaptif melalui koordinasi lintas bidang dalam penyusunan perencanaan
2	Pengembangan sistem data perencanaan dan statistik sektoral yang terpadu sebagai fondasi perencanaan berbasis data dan pengambilan keputusan yang berkualitas	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	• Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) • Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP (Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) • Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP (Bidang Perekonomian dan SDA)	Program ini menjamin ketersediaan data perencanaan sektoral secara terstandar di setiap bidang urusan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral	Mendukung penguatan fondasi data statistik sektoral sebagai basis pengambilan keputusan
3	Peningkatan efektivitas pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian target RPJMD dan prioritas pembangunan nasional	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	• Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perencanaan • Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah • Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD	Program ini secara eksplisit mencakup fungsi pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan daerah terhadap target RPJMD dan prioritas nasional

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM TERKAIT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG RELEVAN	KETERANGAN KETERKAITAN
4	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, SAKIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Manajemen Risiko	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	• Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran • Persentase Aset Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik • Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan • Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan RKPD	Program penunjang menjadi wadah pelaksanaan tata kelola internal organisasi termasuk aspek administrasi, aset, kearsipan, dan pengendalian internal yang relevan dengan SAKIP/SPIP
5	Optimalisasi penelitian, pengembangan, serta inovasi daerah guna menghasilkan kebijakan yang inovatif, berbasis bukti, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah	**Program Riset dan Inovasi Daerah**	• Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan • Persentase Kajian/Riset Berbasis Bukti	Keterkaitan langsung (satu-satu) karena program ini secara spesifik dirancang untuk mendorong riset dan inovasi daerah berbasis bukti
6	Percepatan transformasi digital dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, pengelolaan data, dan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	• Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) • Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral	Mendukung transparansi dan digitalisasi pelayanan publik serta pengelolaan data melalui indikator keterbukaan informasi dan data sektoral
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	• Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP (3 Bidang)	Mendukung digitalisasi pengelolaan data perencanaan pada seluruh bidang
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	• Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perencanaan	Mendukung transformasi digital dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan

Matriks di atas menegaskan bahwa keenam isu strategis Tahun 2027 seluruhnya bermuara pada tujuan “Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan” beserta kedua sasarannya, dan telah diampu oleh salah satu atau lebih dari empat program Bappeda (Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Riset dan Inovasi Daerah; serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) beserta kegiatan pendukungnya sebagaimana dirinci pada Bab IV. Dengan demikian tidak terdapat isu strategis yang belum diintervensi oleh program/kegiatan, maupun program/kegiatan yang tidak berlandaskan pada isu strategis dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2027

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Berpedoman pada RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 serta Renstra Bappeda Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo. Secara umum Bappeda bertugas mengkoordinasikan pencapaian 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian tujuan "*Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan*" dan 2 (dua) sasaran yaitu: *Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pembangunan; dan "Meningkatnya kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah*";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo;
4. Ketersediaan data dan infomasi, kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Wonosobo;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025-2029 dan Renstra Bappeda 2025-2029, Renja Bappeda Tahun 2027 merupakan pelaksanaan Renstra tahun ketiga. Sesuai dengan tugas pokok fungsinya, Bappeda mengampu urusan penunjang pemerintahan pada bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) program urusan dan 1 (satu) program non urusan yang dilaksanakan pada semua perangkat daerah termasuk Bappeda yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program-program tersebut beserta indikatornya adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah yang diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja program beserta targetnya, yaitu:
    1) Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (100%)
    2) Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD (100%)
    3) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (100%)
    4) Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perencanaan (100%)
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja dan targetnya, yaitu:
    1) Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (100%)
    2) Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (100%)
    3) Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (100%)
    4) Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (100%)
    5) Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program

Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (100%)

6) Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP pada Bidang Perekonomian dan SDA (100%)

3. Program Riset dan Inovasi Daerah yang diukur melalui2 (dua) indikator kinerja dan targetnya yaitu:
   1) Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan (22,50%)
   2) Persentase Kajian/Riset Berbasis Bukti (7,50%)
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur melalui 6 (enam) indikator dan targetnya, yaitu:
   1) Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik (100%)
   2) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (100%)
   3) Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (91,00)
   4) Persentase keterisian data statistik sektoral (100%)
   5) Nilai hasil pengawasan kearsipan (65,00)
   6) Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (100%)

Sebagai alat pembuktian rasionalitas perencanaan, sekaligus instrumen kendali mutu yang memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar merupakan jawaban strategis atas permasalahan pembangunan daerah yang telah diidentifikasi, bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, berikut ditampilkan matriks keterkaitan Isu Strategis dengan Program/Kegiatan :

Secara rinci rumusan program dan kegiatan Renja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 sebagaimana tabel Tabel T-C.33/4.2 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju) pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berikut ini :

Tabel 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
Kabupaten Wonosobo Bappeda

KODE					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktifitas	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**9.253.700.784,67**			**10.384.683.882,00**	
5	**1**					**PERENCANAAN**			**9.068.700.784,67**			**9.834.683.882,00**	
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	**Bappeda Kab. Wonosobo**	**100,00%**	**7.636.020.728,67**		**100,00%**	**8.123.227.882,00**	
						Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		**100,00%**			**100,00%**		
						Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		**91,00**			**91,00**		
						Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral		**100,00%**			**100,00%**		
						Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		**65,00**			**65,00**		
						Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		**100,00%**			**100,00%**		
5	*1*	*1*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*100,00%*	*8.823.280,00*		*100,00%*	25.990.722,00	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	3.785.000,00	PAD	5 Dokumen	10.306.529,00	
5	1	1	2.01	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	5.038.280,00	PAD	6 Laporan	15.684.193,00	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*100,00%*	*6.485.718.883,67*	*DAU*	*100,00%*	*6.485.718.883,67*	

KODE					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktifitas	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
5	*1*	*1*	*2.02*		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		41 Orang/bulan	6.485.718.883,67		41 Orang/bulan	6.485.718.883,67	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*100,00%*	*267.443.313,00*		*100,00%*	425.773.693,00	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.500.000,00	PAD	1 Paket	6.280.223,00	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.000,00	PAD	1 Paket	69.780.203,00	
5	*1*	*1*	*2.06*		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	36.000.000,00	PAD	1 Paket	50.241.752,00	
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	23.000.000,00	PAD	4 Paket	25.120.870,00	
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	3.800.000,00	PAD	1 Dokumen	1.116.479,00	
5	1	1	2.06	3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	150.143.313,00	PAD	12 laporan	273.234.166,00	
5	1	1	2.06	5	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*100%*	*0,00*		*100%*	*0,00*	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0,00	PAD		20.934.059,00	
5	1	1	2.06	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0,00	PAD		227.483.473,00	

KODE					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktifitas	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
5	*1*	*1*	*2.06*	*9*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Bappeda Kab. Wonosobo*		*672.210.240,00*			640.438.746,00	
5	*1*	*1*	*2.07*		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	1.200.000,00	PAD	12 laporan	1.674.725,00	
5	1	1	2.07	5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	146.000.000,00	PAD	12 laporan	146.758.200,00	
5	1	1	2.07	6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	525.010.240,00	PAD	12 laporan	492.005.821,00	
5	*1*	*1*	*2.08*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*100%*	*201.825.012,00*		*100%*	296.888.307,00	
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 unit	106.583.052,00	PAD	20 unit	148.747.750,00	
5	1	1	2.08	2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit	4.500.000,00	PAD	1 Unit	6.280.223,00	
5	1	1	2.08	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	37.741.960,00	PAD	10 Unit	67.893.320,00	
5	*1*	*1*	*2.09*		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	53.000.000,00	PAD	1 Unit	73.967.014,00	

KODE					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktifitas	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
5	1	1	2.09	2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah**	**Bappeda Kab. Wonosobo**	**100,00%**	**0,00**		**100,00%**	**0,00**	
						Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD		**100,00%**			**100,00%**		
5	1	1	2.09	5		**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**		**100,00%**			**100,00%**		
5	1	1	2.09	6		**Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perencanaan**		**100,00%**			**100,00%**		
5	1	1	2.09	9	*Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*	*Persentase dokumen perencanaan yang disusun*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*100%*	*275.522.628,00*		*100%*	365.994.902,00	
5	**1**	**2**			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		2 berita acara	100.522.628,00	PAD	2 berita acara	109.798.471,00	
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		2 dokumen	175.000.000,00		2 dokumen	256.196.431,00	
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*100%*	*50.000.000,00*		*100%*	*329.395.412,00*	
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dokumen	25.000.000,00		1 Dokumen	164.697.706,00	
5	*1*	*2*	*2.01*		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		40 orang	25.000.000,00	PAD	40 orang	164.697.706,00	

KODE					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktifitas	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
5	1	2	2.01	5	*Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD yang Tersusun Tepat Waktu*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*4 dokumen*	*30.000.000,00*		*4 dokumen*	104.983.392,00	
5	1	2	2.01		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4 laporan	30.000.000,00	PAD	4 laporan	104.983.392,00	
5	*1*	*2*	*2.02*		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	*Bappeda Kab. Wonosobo*	**100,00%**	**1.102.157.428,00**		**100,00%**	**1.075.780.000,00**	
5	1	2	2.02	2		**Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		**100,00%**			**100,00%**		
5	*1*	*2*	*2.03*			**Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**100,00%**			**100,00%**		
5	1	2	2.03	3		**Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**100,00%**			**100,00%**		
5	**1**	**3**				**Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**		**100,00%**			**100,00%**		
						Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Perekonomian dan SDA		**100,00%**			**100,00%**		

KODE					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktifitas	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*100,00%*	*507.496.114,00*		*100,00%*	*358.593.300,00*	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		18 laporan	75.081.479,00	PAD	18 laporan	139.100.993,00	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		16 laporan	432.414.635,00	PAD	16 laporan	219.492.307,00	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*100,00%*	*327.761.314,00*		*100,00%*	358.593.300,00	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		100,00%	213.968.627,00		100,00%	231.775.051,00	
5	*1*	*3*	*2.01*		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		4 laporan	113.792.687,00		4 laporan	126.818.249,00	

KODE					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktifitas	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		18 laporan	75.081.479,00		18 laporan	75.081.479,00	
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		16 laporan	432.414.635,00		16 laporan	432.414.635,00	
5	*1*	*3*	*2.02*		*Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	*Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*100,00%*	*327.761.314,00*		*100,00%*	*358.593.300,00*	
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		100,00%	213.968.627,00	PAD	100,00%	231.775.051,00	
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		4 laporan	113.792.687,00	PAD	4 laporan	126.818.249,00	
5	*1*	*3*	*2.03*		*Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	*Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	*Bappeda Kab. Wonosobo*	*100,00%*	*266.900.000,00*		*100,00%*	358.593.400,00	
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		3 laporan	136.900.000,00	PAD	3 laporan	200.743.070,00	

KODE					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktifitas	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
5	5	3	2.01	6	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)		3 Laporan	25.000.000,00	PAD	3 Laporan	30.555.554,00	
5	*5*	*3*	*2.02*		Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		1 Laporan	80.000.000,00	PAD	1 Laporan	91.666.667,00	
5	5	3	2.02	2	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset		1 Laporan	0,00	PAD	1 Laporan	61.111.111,00	

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Khusus

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Berpedoman pada RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 serta Renstra Bappeda Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo. Secara umum Bappeda bertugas mengkoordinasikan pencapaian 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian tujuan "*Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan*" dan 2 (dua) sasaran yaitu: *Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pembangunan; dan "Meningkatnya kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah*";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo;
4. Ketersediaan data dan infomasi, kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Wonosobo;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025-2029 dan Renstra Bappeda 2025-2029, Renja Bappeda Tahun 2027 merupakan pelaksanaan Renstra tahun ketiga. Sesuai dengan tugas pokok

fungsinya, Bappeda mengampu urusan penunjang pemerintahan pada bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) program urusan dan 1 (satu) program non urusan yang dilaksanakan pada semua perangkat daerah termasuk Bappeda yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program-program tersebut beserta indikatornya adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah yang diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja program beserta targetnya, yaitu:
    a. Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (100%)
    b. Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD (100%)
    c. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (100%)
    d. Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perencanaan (100%)
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja dan targetnya, yaitu:
    a. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (100%)
    b. Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (100%)
    c. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (100%)
    d. Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (100%)
    e. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (100%)
    f. Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP pada Bidang Perekonomian dan SDA (100%)

3. Program Riset dan Inovasi Daerah yang diukur melalui2 (dua) indikator kinerja dan targetnya yaitu:
    a. Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan (22,50%)
    b. Persentase Kajian/Riset Berbasis Bukti (7,50%)
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur melalui 6 (enam) indikator dan targetnya, yaitu:
    a. Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik (100%)
    b. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (100%)
    c. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (91,00)
    d. Persentase keterisian data statistik sektoral (100%)
    e. Nilai hasil pengawasan kearsipan (65,00)
    f. Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (100%)

Secara rinci rumusan program dan kegiatan Renja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 sebagaimana tabel 4.3 berikut ini :

TABEL 4.3

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KET.
		TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	**100,00%**	**7.636.020.728,67**	
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**100,00%**		
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	**91**		
	Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral	**100,00%**		
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	**65**		
	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	**100,00%**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu*	*100,00%*	*8.823.280,00*	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.785.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.038.280,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum*	*100,00%*	*6.485.718.883,67*	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	6.485.718.883,67	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KET.
		TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum*	*100,00%*	*267.443.313,00*	
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	36.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	23.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.800.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150.143.313,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100%*	*0*	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KET.
		TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*672.210.240,00*	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.200.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	146.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	525.010.240,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100%*	*201.825.012,00*	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	106.583.052,00	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	4.500.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	37.741.960,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	53.000.000,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KET.
		TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah**	**100,00%**	**355.522.628,00**	
	Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD	**100,00%**		
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	**100,00%**		
	Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perencanaan	**100,00%**		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase dokumen perencanaan yang disusun*	*100%*	*275.522.628,00*	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 berita acara	100.522.628,00	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	175.000.000,00	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD*	*100%*	*50.000.000,00*	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	25.000.000,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KET.
		TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 orang	25.000.000,00	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD yang Tersusun Tepat Waktu*	*4 dokumen*	*30.000.000,00*	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 laporan	30.000.000,00	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100,00%**	**1.102.157.428,00**	
	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**100,00%**		
	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**100,00%**		
	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	**100,00%**		
	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Perekonomian dan SDA	**100,00%**		

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KET.
		TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu*	*100,00%*	*507.496.114,00*	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	18 laporan	75.081.479,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16 laporan	432.414.635,00	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA*	*100,00%*	*327.761.314,00*	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	100,00%	213.968.627,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 laporan	113.792.687,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KET.
		TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	*100,00%*	*266.900.000,00*	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 laporan	136.900.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 laporan	130.000.000,00	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	**Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan**	**22,50%**	**185.000.000,00**	
	Persentase Kajian/ Riset Berbasis Bukti	**7,50%**		
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	*Jumlah dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan*	*2 dokumen*	*80.000.000,00*	
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	50.000.000,00	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	30.000.000,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KET.
		TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 dokumen	0	
Invensi dan Inovasi	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan inovasi*		*105.000.000,00*	
Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	0	
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	3 Laporan	25.000.000,00	
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	80.000.000,00	
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	1 Laporan	0	
			9.253.700.784,67	

Identifikasi Program Unggulan/Taktis Perangkat Daerah Tahun 2027

Selaras dengan arahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan 8 (delapan) Program Unggulan (Taktis) Kepala Daerah sebagai penopang utama pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Tahun 2025-2029, yaitu: (1) Dalan Maer, Rejeki Omber; (2) UMKM Berdaya; (3) Produk Lokal Mengglobal; (4) Muda Kreatif, Kontributif; (5) Sobo Asri Lestari Mbangun Desa Nata Kutha; (6) Sobo Sehat, Bergas, Cerdas, Mentas; (7) Praja Nglayani, Ngayomi, Ngayahi; dan (8) Sobo Harmoni Asri Lestari.

Berdasarkan identifikasi terhadap kedelapan Program Unggulan (Taktis) Kepala Daerah Tahun 2027 tersebut, tidak terdapat program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Wonosobo yang berkedudukan sebagai Perangkat Daerah pengampu langsung (leading sector), mengingat pelaksanaan teknisnya diampu oleh Perangkat Daerah urusan sesuai bidang kewenangan masing-masing (antara lain bidang infrastruktur dan sumber daya air, pertanian, perdagangan dan UMKM, pariwisata dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sosial, serta kependudukan dan pencatatan sipil).

Sebagai Perangkat Daerah yang mengampu urusan penunjang bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 secara substansi bersifat lintas sektor dan fasilitatif (koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi), bukan program/kegiatan berbasis output layanan langsung kepada masyarakat sebagaimana lazimnya melekat pada Program Unggulan (Taktis) Kepala Daerah maupun 35 Program Delegasi yang secara teknis diampu oleh Perangkat Daerah urusan.

Namun demikian, dukungan Bappeda terhadap capaian Program Unggulan (Taktis), Program Strategis Nasional, dan Program Delegasi tetap dilaksanakan secara tidak langsung (indirect support), melalui fungsi koordinatif berupa:

1. Penjaminan keselarasan Program Prioritas Nasional dengan Program Daerah, sebagaimana tercermin dalam indikator kinerja "Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah" pada

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan Perangkat Daerah pengampu Program Unggulan (Taktis) dan Program Delegasi, melalui Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada tiga bidang (Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Infrastruktur dan Kewilayahan; Perekonomian dan SDA);
3. Pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, termasuk capaian Program Unggulan (Taktis), ProSN, dan Program Delegasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

4.3 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN)

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, khususnya Tabel 5.1 Program Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN), seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan pendukung ProSN yang berlokasi dan/atau berdampak di Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 — mencakup klaster Penanggulangan Kemiskinan, Sekolah Rakyat, Pembangunan Tiga Juta Rumah, Ketahanan Pangan, Kesehatan untuk Semua, Makan Bergizi Gratis, Perluasan Akses Pendidikan, serta Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi — diampu secara teknis oleh Perangkat Daerah urusan, antara lain Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, tidak terdapat program, kegiatan, maupun subkegiatan Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 yang berkedudukan sebagai Perangkat Daerah pelaksana (pengampu teknis) ProSN dimaksud. Pernyataan ini disampaikan secara eksplisit agar dapat ditelusuri (auditable) dalam proses evaluasi dan reviu dokumen perencanaan.

Meskipun demikian, dukungan Bappeda terhadap keberhasilan pelaksanaan ProSN di Kabupaten Wonosobo tetap dilaksanakan secara tidak langsung (indirect support) melalui fungsi koordinatif, sebagaimana tercermin pada indikator kinerja "Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah" pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta melalui fungsi sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah teknis pengampu ProSN sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 4.2.

4.4 Dukungan terhadap Program Delegasi

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Bappeda Tahun 2027 turut mencermati ketentuan mengenai dukungan terhadap 35 (tiga puluh lima) Program Delegasi sebagaimana diamanatkan dalam pedoman penyusunan RKPD/Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Program delegasi dimaksud pada dasarnya merupakan program dengan nomenklatur yang secara teknis diampu oleh Perangkat Daerah urusan (Perangkat Daerah teknis/pelayanan dasar dan urusan pilihan), sedangkan Bappeda Kabupaten Wonosobo berkedudukan sebagai Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan yang bersifat koordinatif dan non-teknis, dengan nomenklatur program tersendiri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya, yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Riset dan Inovasi Daerah; serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan penelaahan tersebut, tidak terdapat satu pun dari 35 Program Delegasi dimaksud yang secara nomenklatur melekat pada program Bappeda Kabupaten Wonosobo. Untuk memastikan kesesuaian pemahaman ini, Bappeda akan melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan/atau Kementerian Dalam Negeri mengenai relevansi program delegasi dimaksud bagi Perangkat Daerah koordinatif/non-teknis seperti Bappeda. Hasil konfirmasi tersebut akan dituangkan pada pemutakhiran dokumen berikutnya; sampai dengan diterimanya hasil konfirmasi resmi, Bappeda memposisikan diri tidak

menjadi Perangkat Daerah pengampu program delegasi dimaksud, sejalan dengan kedudukannya selaku Perangkat Daerah koordinatif sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 4.2.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 merupakan ukuran keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2027. IKU disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025–2029, serta menjadi dasar dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penetapan IKU juga telah diselaraskan dengan RKP Tahun 2027, RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Target IKU Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIDANG URUSAN TAHUN 2027

OPD : BAPPEDA

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra (Tahun berkenaan)	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Angka	22.31	21.95	22.31	Bidang Randalevalitbang Bappeda
2	Nilai Keselarasan Program Prioritas	Angka	22.15	22.03	22.31	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo
3	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam Perencanaan dan	%	100%	100%	100%	Bidang Randalevalitbang Bappeda
4	Nilai Kapabilitas Inovasi	Angka	2.94	3.02	3.02	BRIN
5	Nilai Kematangan Organisasi	Angka	48	44	48	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo
6	Nilai SAKIP	Angka	74,00	72.03	75,00	Inspektorat Kabupaten Wonosobo

Secara umum, Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 diarahkan pada beberapa fokus sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan**

   IKU diarahkan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, konsisten, berbasis data, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Indikator ini menjadi ukuran efektivitas fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan Pembangunan

2. **Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

   Indikator difokuskan pada peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik pada aspek perencanaan maupun pengelolaan kinerja organisasi. Peningkatan nilai akuntabilitas diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

3. **Peningkatan kualitas pelayanan publik**

   IKU juga diarahkan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penyediaan layanan yang cepat, mudah, responsif, dan didukung informasi pembangunan yang akurat serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan

4. **Penguatan inovasi daerah dan pemanfaatan hasil penelitian**

   Kinerja bidang penelitian dan pengembangan diukur melalui indikator yang menggambarkan peningkatan pemanfaatan hasil kajian, penelitian, dan inovasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung penerapan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*)

5. **Penguatan koordinasi pembangunan daerah**

   IKU mendukung peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah, DPRD, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Koordinasi yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah

Target IKU Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 serta mempertimbangkan target Renstra Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, target indikator dapat mengalami penyesuaian, baik meningkat maupun menurun, sesuai hasil evaluasi, perkembangan kondisi pembangunan, serta penajaman pada Rancangan Akhir Renja. Melalui penetapan IKU tersebut diharapkan seluruh program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 dapat dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo. Penetapan IKK diselaraskan dengan Renstra Bappeda Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 dapat dilihat dari Tabel 5.2/T-52IKK sebagai berikut :

TABEL 5.2

TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BIDANG URUSAN TAHUN 2027

OPD : BAPPEDA

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra (Tahun berkenaan)	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	Dokumen RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, SIPD RI
2	Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	Dokumen RPJMD dan RKPD
3	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD
4	Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perencanaan	%	100	100	100	LKPJ, LKjIP, LPPD, Laporan Evaluasi RKPD
5	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	RKPD, Renja PD, SIPD RI
6	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	Basis Data Perencanaan Bappeda, SIPD RI, SOP Pengelolaan Data
7	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	RKPD, Renja PD, SIPD RI
8	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	Basis Data Perencanaan Bappeda, SIPD RI, SOP Pengelolaan Data
9	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	RKPD, Renja PD, SIPD RI
10	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	Basis Data Perencanaan Bappeda, SIPD RI, SOP Pengelolaan Data

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra (Tahun berkenaan)	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	%	20	N/A	22,50	aporan Inovasi Daerah, Indeks Inovasi Daerah (IID), Data Bidang Litbang
12	Persentase Kajian/Riset Berbasis Bukti	%	5.00	N/A	7.50	Dokumen Kajian/Riset Bappeda, Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan
13	Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	65.00	100	100	Kartu Inventaris Barang (KIB), SIMDA BMD/SIPD Barang Milik Daerah, Laporan Pengurus Barang
14	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	Laporan Kinerja Sekretariat, SOP Pelayanan Administrasi
15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Angka	91.00	95.00	95.00	Hasil Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
16	Persentase keterisian data statistik sektoral	%	100	100	100	Portal Satu Data Kabupaten Wonosobo, Data Statistik Sektoral, Walidata
17	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Angka	65.00	37.40	65.00	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan dari Dinas Kearsipan/ANRI
18	Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	%	100	100	100	RKPD, Renja Perangkat Daerah, SIPD RI

Secara umum, IKK Tahun 2027 difokuskan pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. **Penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah**

   IKK diarahkan untuk memastikan keterpaduan antara Program Prioritas Nasional, RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Seluruh indikator keselarasan dokumen perencanaan ditargetkan mencapai 100 persen sebagai bentuk komitmen menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah;

2. **Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi Pembangunan**

   Indikator difokuskan pada ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan dan keselarasan pelaksanaan program pada seluruh bidang urusan. Upaya ini bertujuan mendukung proses monitoring dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan;

3. **Penguatan kualitas data perencanaan**

   Ketersediaan data perencanaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu indikator penting pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Data yang berkualitas menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*);

4. **Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah**

   IKK diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan produk inovasi dan hasil kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Meskipun realisasi Tahun 2025 belum tersedia karena menyesuaikan siklus penilaian, target Tahun 2027 tetap dipertahankan sesuai Renstra sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan inovasi daerahMenyajikan target IKK Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;

5. **Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan internal**

   Indikator meliputi kondisi aset perangkat daerah, cakupan pelayanan administrasi perkantoran, keterbukaan informasi publik, pengelolaan statistik sektoral, dan penyelenggaraan kearsipan. Indikator-indikator

tersebut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Beberapa target ditingkatkan, seperti nilai pengawasan kearsipan, sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan arsip perangkat daerah;

6. **Penguatan sinkronisasi pembangunan daerah.**

   Indikator keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD ditetapkan sebesar 100 persen, sebagai wujud komitmen Bappeda dalam memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027, dilakukan telaah kesesuaian antara target kinerja yang tercantum pada Tabel 5.2 dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana termuat pada Tabel 4.3.2. Telaah tersebut dilakukan dengan membandingkan target Renstra pada tahun berkenaan terhadap realisasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, guna memastikan bahwa penetapan target pada Renja bersifat realistis, terukur, dan mencerminkan prinsip peningkatan kinerja berkelanjutan (continuous improvement).

Berdasarkan hasil telaah dimaksud, teridentifikasi dua kondisi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, yaitu: *pertama*, terdapat indikator yang realisasinya telah melampaui target Renstra jauh sebelum tahun target tercapai, sehingga diperlukan penyesuaian target ke arah yang lebih progresif agar tidak menimbulkan kesan penurunan kinerja; dan *kedua*, terdapat indikator yang realisasinya justru berada jauh di bawah target Renstra pada tahun dasar, sehingga meskipun target akhir tidak diubah, kondisi tersebut perlu dinarasikan sebagai catatan risiko pencapaian target guna mendasari perumusan langkah percepatan pada tahun rencana. Uraian justifikasi atas kedua kondisi tersebut disampaikan sebagai berikut :

a. **Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) — Target 2027 disesuaikan dari 91,00 menjadi 95,00**

   Berdasarkan Tabel 4.3.2 Renstra, target Nilai KIP untuk Tahun 2027 ditetapkan sebesar 91,00. Namun demikian, realisasi capaian Tahun 2025 telah mencapai angka 95,00 — yaitu telah melampaui target

Renstra Tahun 2027 sejak dua tahun sebelum tahun target dimaksud tercapai. Apabila target Tahun 2027 tetap dipertahankan pada angka 91,00 sebagaimana Renstra, maka target tersebut secara substansi tidak lagi relevan karena berada di bawah capaian aktual yang telah diraih, dan berpotensi menimbulkan kesan penurunan kinerja (*regressive target*) yang tidak sesuai dengan prinsip peningkatan kinerja berkelanjutan.

Oleh karena itu, penetapan target Tahun 2027 sebesar 95,00 pada Tabel 5.2 merupakan penyesuaian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan (auditable), dengan pertimbangan:

1. Mempertahankan prinsip *progresivitas kinerja*, di mana target tahun berjalan tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari realisasi yang telah dicapai sebelumnya;
2. Menjaga konsistensi dengan hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai sumber data resmi, yang telah mengonfirmasi capaian 95,00 pada Tahun 2025;
3. Penyesuaian ini bersifat sebagai usulan revisi target yang perlu ditindaklanjuti secara formal melalui mekanisme reviu Renstra pada periode berikutnya, agar terjadi kesesuaian menyeluruh antara dokumen Renja dan Renstra dan tidak menimbulkan inkonsistensi berulang pada tahun-tahun perencanaan berikutnya (2028-2030 dalam Renstra juga perlu dikaji ulang, mengingat target 2028 pada Renstra saat ini hanya 91,50).

b. Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (Catatan Risiko Capaian)

Berbeda dengan indikator KIP, pada indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan justru ditemukan kesenjangan kinerja yang signifikan: realisasi Tahun 2025 hanya mencapai 37,40, jauh di bawah target Renstra Tahun 2025 sebesar 60,00 (gap sebesar 22,60 poin). Meskipun target Tahun 2027 pada Tabel 5.2 (65,00) telah sesuai dengan target Renstra Tahun 2027, kesenjangan capaian pada tahun dasar (2025) ini perlu dinarasikan sebagai catatan risiko pencapaian target, mengingat:

1. Diperlukan akselerasi kinerja yang signifikan pada Tahun 2026 dan 2027 untuk dapat mengejar target 65,00 pada akhir Tahun 2027;
2. Perlu diidentifikasi akar masalah rendahnya realisasi Tahun 2025 (misalnya keterbatasan SDM kearsipan, sarana prasarana, atau belum optimalnya penerapan SOP pengelolaan arsip), agar dapat dirumuskan langkah intervensi/perbaikan pada tahun rencana (2027);
3. Target Tahun 2027 tetap dipertahankan sebesar 65,00 (tidak diturunkan) sebagai bentuk komitmen pencapaian target Renstra, namun perlu disertai rencana aksi percepatan yang lebih konkret pada kegiatan terkait di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional Renstra Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029. Penyusunan dokumen ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 14 Tahun 2026, Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, serta ketentuan teknis lainnya yang mengatur penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Rancangan Akhir Renja Tahun 2027 merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah melalui proses pembahasan, sinkronisasi, harmonisasi, dan penyempurnaan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, perkembangan kebijakan nasional dan daerah, hasil pembahasan bersama para pemangku kepentingan, serta penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu pendanaan yang tercantum dalam dokumen ini telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027.

Sesuai ketentuan penyusunan dokumen perencanaan daerah, Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo untuk dilakukan verifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2027 ditetapkan. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan akhir sebelum Renja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai dokumen Renja definitif. Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2027 serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi Bappeda. Pelaksanaan Renja Tahun 2027 harus dilaksanakan secara konsisten dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi,

akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan perlu didukung oleh koordinasi yang kuat antarbidang, sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait, serta pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan agar sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan, pelaksanaan Renja Tahun 2027 juga harus didukung oleh penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan, pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan Keputusan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 sangat ditentukan oleh komitmen seluruh aparatur, sinergi antarperangkat daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, koordinasi, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan perlu terus ditingkatkan guna memastikan seluruh target kinerja dapat dicapai secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029. Dengan ditetapkannya Renja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, diharapkan dokumen ini menjadi pedoman yang efektif dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, penelitian, dan pengembangan daerah selama Tahun 2027. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan akuntabel, Bappeda diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, 30 Juli 2026

Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonosobo



Drs.TONO PRIHATONO

Pembina Utama Muda

NIP. 197402111993031001